



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 Balai KIPM Jakarta II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan pada Balai KIPM Jakarta II selama Tahun Anggaran 2024. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan support dan sarannya sehingga pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II



Dede Suhendra, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis.....	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Sasaran.....	7
2.2 Indikator dan Target Kinerja	8
2.3 Pengukuran Kinerja.....	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja.....	11
3.2 Analisis dan Evaluasi	13
3.3 Realisasi Anggaran	38
IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Rekomendasi	40
4.3 Tindak lanjut Rekomendasi	40
LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Jakarta IITA 2024.....	8
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024	11
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 Tahun 2024	15
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 Tahun 2024.....	16
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 Tahun 2024	17
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 Tahun 2024	18
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 Tahun 2024	19
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 Tahun 2024.....	20
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 Tahun 2024	21
Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 Tahun 2024	21
Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 Tahun 2024	23
Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 Tahun 2024.....	28
Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 Tahun 2024	29
Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 Tahun 2024	29
Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 Tahun 2024	30
Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 Tahun 2024	35
Tabel 20 Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Tahun 2024	38
Tabel 21 Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai KIPM Jakarta II pada Tahun 2024 adalah 112,66%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Jakarta II yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

A. Dari 14 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK tahun 2024, terdapat Balai KIPM Jakarta II mempunyai Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Target Kinerja Balai KIPM Jakarta II terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan.

Balai KIPM Jakarta II telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama periode Tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Jakarta II pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan Perikanan.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II, target Tahun 2024 adalah 70% dan realisasi 83,33% sehingga capaian 119,04%;
- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sector produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II, target Tahun 2024 adalah 70% dan realisasi 72,04% sehingga capaian 102,91%;
- c. Persentase pengawasan mutu hasil di wilayah RI lingkup Balai KIPM Jakarta II, UPI lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II , target Tahun 2024 adalah 70% dan realisasi 100 %, dengan persentase 120 %;
- d. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target Tahun 2024 adalah 99%, sudah terealisasi sebesar 100% dengan persentase 101,01%

2. Sasaran strategis 2 yaitu **Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar**

IKU untuk SS juga dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Jakarta II, realisasi adalah 83,10% dari target 70% dengan persentase sebesar 118,71%;

3. Sasaran Strategis 3 yaitu **Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup**

BPPMHKP. Capaian IKU untuk SS ini adalah sebagai berikut :

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Jakarta II dari target 3,36, realisasi 3,71 sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 110,42%;
- Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 86, realisasi 87,88 dengan persentase capaian kinerja 102,19%;
- Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 82, realisasi 82,15 dengan persentase capaian kinerja 100,18%;
- Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 71, realisasi 100% dengan persentase capaian 120%;
- Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 93,76 realisasi 91,49 dengan persentase capaian 97,58%
- Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 100%, realisasi 100% dengan persentase capaian 100%;
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target 80%, realisasi 100% dengan persentase capaian 120%;
- Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target yang ditetapkan 80%, realisasi 84,34% dengan persentase capaian 105,43%;
- Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target yang ditetapkan 80%, realisasi 97,50% dengan persentase capaian 120%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Balai KIPM Jakarta II Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2024 dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat

permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Balai KIPM Jakarta II dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Balai KIPM Jakarta II pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Balai KIPM Jakarta II dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta system jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Balai KIPM Jakarta II) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Jakarta II dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Jakarta II dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Jakarta II. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

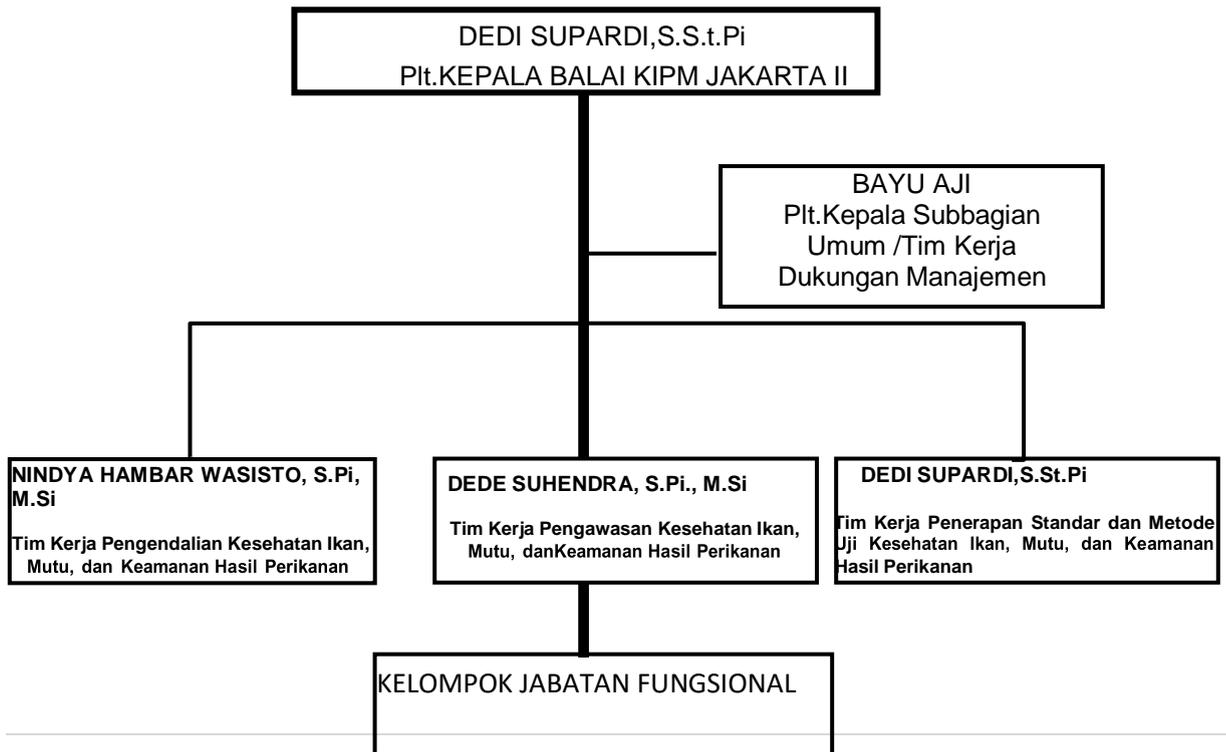
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keamanan Hasil Perikanan, sebagai penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mtu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautanj dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai KIPM Jakarta II menyelenggarakan fungsi:

- a) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b) merupakan mempunyai tugas sebagai Quaiity Assurance;
- c) mengatur pelaksanaan system penjaminan mutu ditingkat lokal diseluruh negara.
- d) Memaparkan pada tingkat hulu, Lembaganya melaksanakan sertifikasi seperti Cara penanganan yang baik (good handling practices), Cara budidaya ikan yang baik (good aquaculture practices), Cara produksi obat ikan yang baik (good fish drugs production practices), Cara produksi pakan ikan yang baik(good fish feed production practices), Cara penanganan yang baik di atas kapal penangkap ikan (good handling practices on board fishing ports) ;
- d) Sementara pada tingkat hilir, BPPMHKP melaksanakan sertifikat cara pembuatan yang baik (good manufacturing practices), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan pengelolaan distribusi ikan yang baik (good fish distribution management practices).
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.Dalam melaksanakan tugas

dan fungsi Balai KIPM Jakarta II, Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II dibantu oleh Plt.Kepala Subbagian Umum, 2 orang Inspektur Mutu Ahli Madya, 6 Inspektur Mutu Ahli Muda (2 orang ketua Pokja), 1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 3 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 1 orang Analis Mutu Hasil Perikanan, 2 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil (1 orang Asisten inspektur mutu terampil mutasi dari pegawai Balai KIPM Banjarmasin ke Balai KIPM Jakarta II pada bulan Nopember) , 4 orang staf pelaksana, dan 14 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 11 orang PJLP.

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai KIPM Jakarta II



1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai KIPM Jakarta II disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai KIPM Jakarta II adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data

dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan dalam permenKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang pengelolaan Kinerja Organisasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan susunan sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

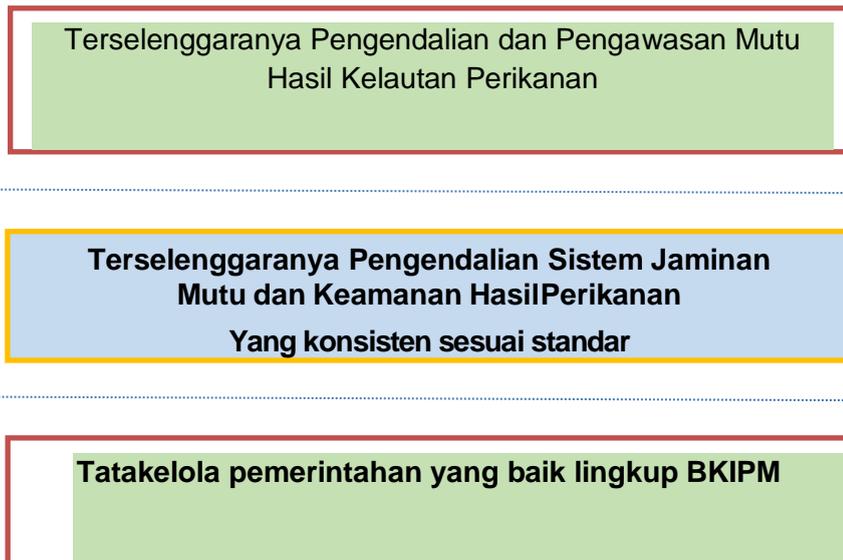
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Balai KIPM Jakarta II tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.

PETA STRATEGIS BALAI KIPM JAKARTA II TAHUN 2024



Gambar 2 **Peta Strategi BALAI KIPM JAKARTA II tahun 2024**

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2024 Balai KIPM Jakarta II mempunyai indikator sebanyak 14 Indikator sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	99
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian system jaminan mutu dan Keamanan Hasil kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi Balai KIPM Jakarta II (%)	70
SK3.1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP	6	Indeks kepuasan masyarakat lingkup Balai KIPM Jakarta II (Indeks)	3,36

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II (Indeks)	86
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	82
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	71
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	93,76
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	80
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	80

2.3 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

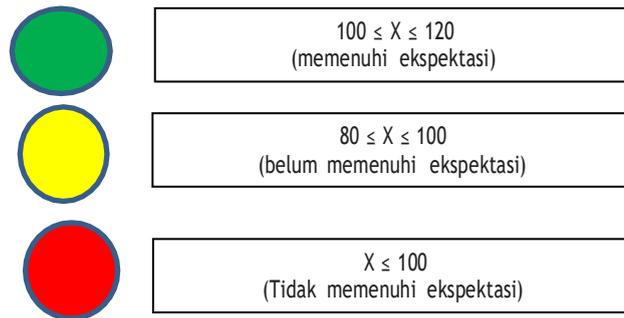
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

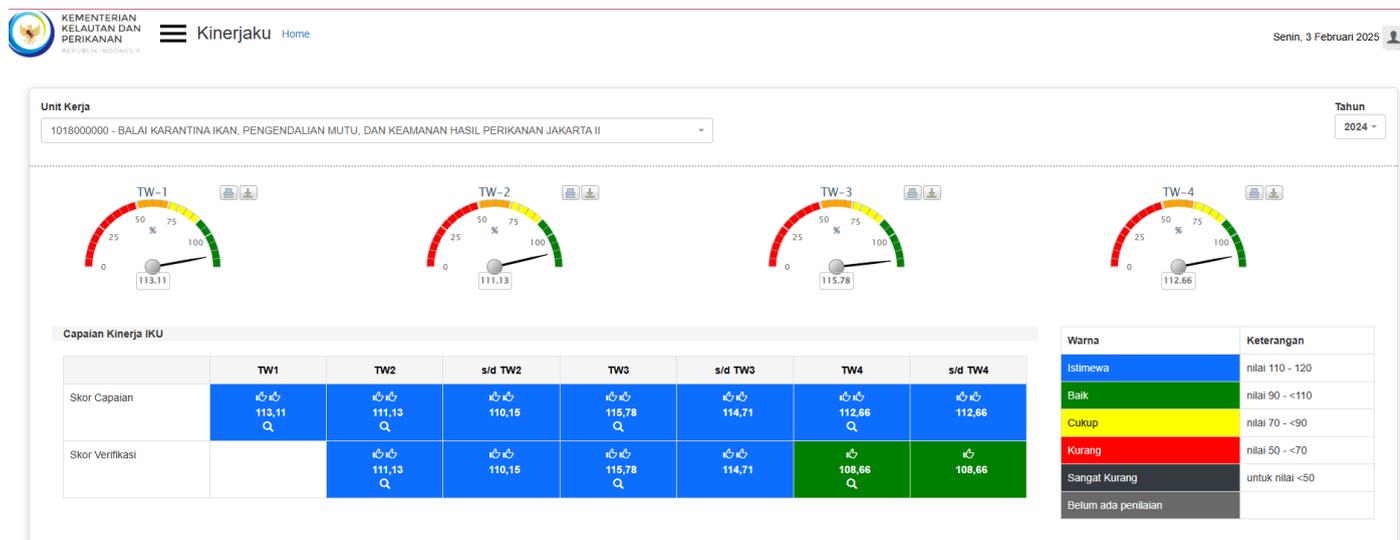
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Tahun 2024 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,66% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Tahun 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN IV 2024				
		TARGET	REALISASI	%		
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70	83,33	119,04
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70	72,04	102,91
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70	100	142,85
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	99	100	101,01
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian system jaminan mutu dan Keamanan Hasil kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi Balai KIPM Jakarta II (%)	70	3,180	118,71

Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP

SK3.1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang BaikLingkup BPPMHKP	6	Indeks kepuasan masyarakat lingkup Balai KIPM Jakarta II (Indeks)	3,36	3,71	110,42
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II (Indeks)	86	87,88	102,19
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	82	82,15	100,18
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	71	100	140,84
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	93,76	91,49	97,58
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	100	100	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	80	100	125
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	80	84,34	105,42
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	80	97,50	122

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup Balai KIPM Jakarta II.

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Persentase Hasil kelautan dan perikanan sector primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah hasil kelautan dan perikanan sector produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pada Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 70% realisasi capaian indikator ini sebesar 83,33% . Atau dengan persentase 119,04%.

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase unit usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase unit menerapkan CPIB

C = Persentase unit usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase unit usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase unit usaha menerapkan CPOIB kapal

F = Persentase unit usaha menerapkan CPIB kapal

Xn = jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

**) komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ada UPT*

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN DI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI



Kegiatan Koordinasi Produksi primer KKP (Pembenihan untuk CPIB, Budidaya untuk CBIB, Pabrik Pakan untuk CPPIB, Pabrik Obat Ikan untuk CPOIB DI Wilayah Kota Bekasi Jawa Barat.

Pada Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 70% realisasi rapaian indikator ini sebesar 83,33% Atau dengan persentase 119,04%.

Tabel 3. Target dan Realisasi IKK1 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	-	-	-	-	83,33%	70%	83,33%	119,04	70%	83,33

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Pada Tahun 2024 IKU ini ditargetkan sebanyak 70%, realisasi capaian indikator adalah 72,04 dengan persentase sebesar 102,91%.

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase unit usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase unit menerapkan CPIB

xn = jumlah dari unsur pembentuk (2)*

*) komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yang ada UPT

Tabel 4. Target dan Realisasi IK2 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	-	-	-	-	72,04%	70%	72,04%	102,91	70%	102,91%

IK3. **Persentase pengawasan mutu hasil Perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Jakarta II**

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. Pada Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 70%, realisasi capaian indikator ini sebesar 100% dengan persentase capaian 142,85%.

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Ket:

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil peikanan di wilayah RI

A = Jumlah kab/kota/yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota/ yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Tabel 5. Target dan Realisasi IK3 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase pengawasan mutu hasil Perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	-	-	-	100%	70%	100%	142,85%	70%	100%

IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. Target pada Tahun 2024 IKU ini ditargetkan sebesar 99% dan realisasi 100% dengan persentase capaian adalah 101,01%.

$$x \frac{A - B}{A}$$

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

(Notifikasi penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan

Tabel 6. Target dan Realisasi IK4 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)				-	100	99	100	101,01	99	100

Kegiatan Manajemen Mutu

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Manajemen Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yaitu Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

Sasaran Strategisi 2. Terselenggaranya Pengendalian system jaminan Mutu dan Keamanan Hasil kelautan dan Perikanan yang sesuai standar

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif lingkup Balai KIPM Jakarta II.

IK5. Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Adapun perhitungan rumus adalah sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

%X = Persentase nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi

A = Persentase nilai penerapan ISO 17020

B = Persentase penerapan ISO 17025

Tabel 7. Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi Balai KIPM					83,10%	70%	83,10%	118,71	70%	83,10%

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari satu sasaran strategis, yakni **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP.**

Sasaran Strategis 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP.

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Balai KIPM Jakarta II.

IK.6 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat di Balai KIPM Jakarta II pada tahun 2024 menggunakan Survey melalui manual. Indikator ini pada Tahun 2024 dengan target nilai sebesar 3,36 dan terealisasi sebesar 3,71 (sangat baik).

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan proses Survei Kepuasan Masyarakat kepada pada pengguna jasa,
- Mengolah hasil Survey
- Menyajikan serta melaporkan hasil SKM.
- Mensosialisasikan nilai SKM kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media social maupun papan iklan.

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

Table 3. Hasil Nilai Rata-rata Unsur dan Masing-masing Unit Pelayanan Triwulan IV

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	Persyaratan	3.74
2	Prosedur	3.7666
3	Waktu pelayanan	3.74
4	Biaya / tarif	3.77
5	Produk layanan	3.73
6	Kompetensi pelaksana	3.69
7	Perilaku pelaksana	3.70
8	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	3.7066
9	Sarana dan prasarana	3.70

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Balai KIPM Jakarta II

Tabel 8. Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks kepuasan masyarakat lingkup Balai KIPM Jakarta II (Indeks)			92,49	92,95	3,71	3,36	3,71	110,42	3,36	3,71

IK7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kinerja; dan
 - d. Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka terdapat beberapa penyesuaian dari dimensi Kualifikasi sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi

yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Penyesuaian Kompetensi sebagai berikut:

- 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;

- 2) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

Penyesuaian dimensi Kinerja sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

• Nilai	• Nama Hukuman Disiplin	• Nilai Disiplin
• 0	• Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	• 5
• R	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	• 3
• S	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	• 2
• B	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	• 1

Penyesuaian dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
- b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.
- c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.

- b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Indeks Profesionalitas ASN Balai KIPM Jakarta II dihitung dengan menghitung rata-rata nilai dari seluruh komponen. Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024 sebesar 87,88 (tinggi). persentase capaian sebesar 102,19. Capaian telah melebihi dari target tahunan sebesar 86. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 89,48.

IP ASN 2024												
3	PRIMER	20	21,85	87,4 %	37,48	83,7 %	25,25	84,17 %	5	100 %	89,58	TINGGI
4	PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PASCAPANEN	25	20,52	82,08 %	38,2	95,5 %	25	83,33 %	5	100 %	88,72	TINGGI
5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	17	21	84 %	35,07	87,67 %	25	83,33 %	5	100 %	86,07	TINGGI
6	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	37	21,08	84,32 %	39,7	99,25 %	25	83,33 %	5	100 %	90,78	TINGGI
7	BALAI KIPM DENPASAR	16	21,69	86,76 %	38,34	95,85 %	25	83,33 %	5	100 %	90,03	TINGGI
8	BALAI KIPM SURABAYA I	47	21,11	84,44 %	38,99	97,47 %	25,11	83,7 %	5	100 %	90,2	TINGGI
9	BALAI KIPM MEDAN I	18	21,17	84,68 %	39,17	97,93 %	25	83,33 %	5	100 %	90,33	TINGGI
10	BALAI KIPM BALIKPAPAN	17	20,76	83,04 %	37,94	94,85 %	29,41	98,03 %	5	100 %	93,12	SANGAT TINGGI
11	BALAI KIPM JAYAPURA	10	21,6	86,4 %	35,59	88,98 %	25	83,33 %	5	100 %	87,19	TINGGI
12	BALAI KIPM JAKARTA II	20	21,5	86 %	36,38	90,95 %	25	83,33 %	5	100 %	87,88	TINGGI
13	BALAI KIPM SURABAYA II	42	21	84 %	39,64	99,1 %	25	83,33 %	5	100 %	90,64	TINGGI
14	BALAI KIPM MATARAM	16	21,81	87,24 %	39,41	96,52 %	27,5	91,67 %	5	100 %	93,73	SANGAT TINGGI
15	BALAI KIPM MANADO	16	21,06	84,24 %	38,91	97,27 %	25	83,33 %	5	100 %	89,97	TINGGI

Nilai IP ASN Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024

Tabel 8 Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN			83,56%	89,48%	87,88%	86	87,88%	102,19	86	87,88%

IK8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Nilai Penilaian Mandiri Balai KIPM Jakarta II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%)

FORMULASI PERHITUNGAN

- Nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri [Sekretariat Es.1](#)
- atas implementasi SAKIP di (Unit Kerja Level 2)
- Kategori nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Pada Tahun 2024 IKU ini ditargetkan sebesar 82, realisasi capaian adalah 82,15 dengan persentase capaian 100,18.

Tabel 9 Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	-	-	-	-	82,15	82	82,15%	100,18%	82	82,15%

IK9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

NKA Unit Eselon I

NKA unit eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian indikator kinerja program, Nilai efektifitas satker dan nilai efisiensi satker dengan bobot masing-masing indikator, adapun bobot setiap indikator kinerja anggaran tingkat unit eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektifitas (75)	1. Capaian indikator kinerja program	30
	2. Nilai efektifitas satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai efisiensi satker	25

a. Efektifitas

1) Capaian indikator kinerja program

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKPi}{TIKPi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100 \% \right)$$

Keterangan :

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis kementerian/Lembaga

RIKSS : Realisasi indikator kinerja sasaran strategis i

TIKSS : Target indikator kinerja sasaran strategis i

n : Jumlah indikator kinerja sasaran strategis

3) Nilai efektifitas satker

$$NEf\ satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Tabel 10 Target dan Realisasi IK 9 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	-	-	-	100	71	100%	120%	71	120%

IK10. Nilai IKPA Balai KIPM Jakarta II

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4(empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

FORMULA PERHITUNGAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobor Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

Penyerapan Anggaran-bobot penilaian 20% Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik

Target Triwulan dihitung dengan

- $TAn = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

- $TPBelPegn = \text{Pagu BPeg} \times \text{Target BPeg Tw ke-n}$
- $TPBelBarn = \text{Pagu BBar} \times \text{Target BBar Tw ke-n}$
- $TPBelModn = \text{Pagu BMod} \times \text{Target BMod Tw ke-n}$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan

$$NKPA_n = \frac{(PAN)}{(TPn)} \times 100$$

Dispensasi SPM – Bobot penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap diterbitkan SPD2D – nya pada Tahun 2024 ,
- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategory rasio dispensasi SPM sebagaimana berikut :

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

Rasio Dispensasi (permil) RDSPM =

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ DISPENSASI}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 100$$

Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarakan nilai komposit antara nilai kinerja (1) komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja padabulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{ROKW}}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio anatara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I samapai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA

- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang terkonfirmasi

$$NK - CRO = \frac{\sum_{i=1}^n \text{capaian ro}}{N} \left(\frac{\text{Target RO}}{N} \right)$$

- Nilai indikator capaian Output IKPA – CKRO = (NK – ROKW x 30%)+(NKRO x 70%)

Target Nilai IKPA lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II tahun 2024 sebesar 93,76 , dengan capaian realisasi 91,49 pengukuran secara semesteran. Berdasarkan hasil penilaian pada Aplikasi OMS PAN Kementerian Keuangan di laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/> , capaian nilai IKPA Tahun 2023 sebesar 89,89 lebih rendah dari capaian nilai IKPA Tahun 2024.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I JAKARTA II

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	032	640682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	74.42	89.00	92.33	100.00	82.97	100.00	91.49	100%	0.00	91.49
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	11.16	17.80	9.23	10.00	8.30	25.00				
					Nilai Aspek	87.21		91.08			100.00					

Nilai IKPA lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024

Tabel 12 Target dan Realisasi IK 11 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai IKPA lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II			92,34	89,89	91,49	93,76	91,49%	97,58%	93,76	98%

IK11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan engungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan 100 %, dan pada Tahun 2024 target sebesar 100%.

Adapun jenis pengukuran adalah sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK Lingkup UPT yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah Total Rekomendasi BPK Lingkup UPT}} \times 100\%$

Tabel 10 Target dan Realisasi IK11 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II	100	100	-	100	100	100	100	100%	100	100%

IK12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin

berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Pengukuran dari IKU ini adalah sebagai berikut :

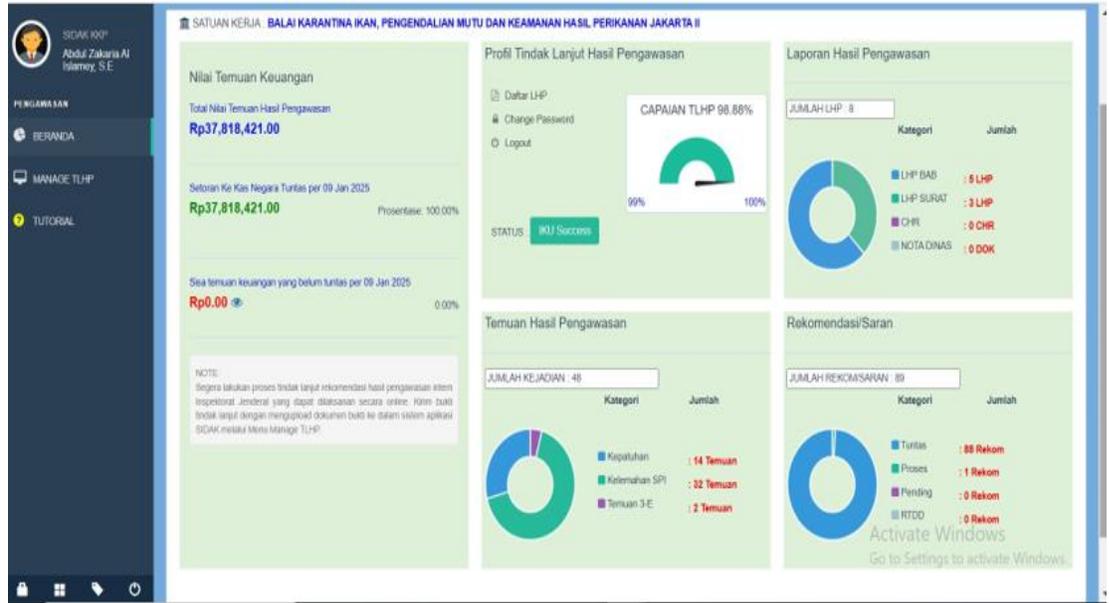
$$\frac{\sum N_t \times 100}{\sum N}$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP inspektorat jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP inspektorat jenderal KKP yang diberikan

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh Balai KIPM Jakarta II yang menjadi objek pengawasan dengan target selama setahun 80% rekomendasi ditindaklanjuti pada tahun 2024.

Pada IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Balai KIPM Jakarta II berdasarkan dashboard aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan pada <http://sidak.kkp.go.id/>. Pada Tahun 2024 indikator ini mempunyai target 80% dengan realisasi sebesar 100 dengan persentase capaian kinerja 125%. Dan sudah melebihi target Tahun 2024 .



Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024

Tabel 11 Target dan Realisasi IK12 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja			97	100	100	80	100	120%	-	-

IK13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Target indicator ini pada tahun 2024 adalah 80%, realisasi 84,34% dengan persentase 105,42%.

Tabel 14 Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Jakarta II			76,21	78,26	84,34	80	84,34	105,43	80	105

IK14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (10%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi asset) tahun 2018-2023 (20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Cara Serah Terima Acara Pemakaian (25%)
- Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%).

Pada triwulan IV tahun 2024 target 80% realisasi 97,50% dengan persentase 122%.

Tabel 15 Target dan Realisasi IK14 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi					2024			Renstra 2020 - 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Jakarta II			97,50	97,36	97,50	80	97,50	120%	80	97

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Jakarta II pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah sebesar Rp. **10.683.142.000** dan pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. **10,006,904,556,-** atau sebesar **93,67%** Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Jakarta II TW IV T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 20 dan Tabel 21.

Tabel 20. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2024

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN(Rp)	%
1	7010	Manajemen Mutu	639,000,000	428,549,213	67,07
2	3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2,558,083,000	2,409,934,702	94,21
4	3987	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	7,486,059,000	7,168,420,641	95,76
		TOTAL	10,683,142.000	10,006,904,556	93,67

Tabel 21. Penyerapan Anggaran per Jenis Akun Tahun 2024

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3.690.668.000	3.472.236.149	94,08
2	Belanja Barang	5.349.391.000	4,992,395,246	93,33
3	Belanja Modal	1.643.083.000	1,542,273,161	93,86
	TOTAL	10,683,142.000	10,006,904,556	93,67

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Balai KIPM Jakarta II pada tahun 2024, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Tahun 2024 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,66 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Dari 14 Indikator Kinerja terdapat 5 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 1 Indikator Kinerja yang realisasinya sesuai target, dan sebanyak 8 yang belum ada target dan realisasi pada Tahun 2024.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan IV tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

- Pada triwulan IV terdapat revisi Perjanjian Kinerja tahun 2024, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) menyesuaikan dengan Pusat Produksi Primer, Pusat Pasca panen dan Pusat Manajemen Mutu
- Adapun Terdapat perubahan IKU pada triwulan IV sebagai berikut :
- IKU.1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sector produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II dengan Target 70%;
 - IKU.2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sector produksi Pasca Panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II dengan Target 70%;
 - IKU.3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di Wilayah RI lingkup Balai KIPM Jakarta II dengan Target 70%;
 - IKU.4 Rasio ekspor ikan dan hasil lingkup Balai KIPM Jakarta II dengan Target 70%;

- IKU.5 Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Jakarta II dengan Target 70%;
- IKU.6 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Jakarta II semula dengan Target 86 pada triwulan IV menjadi 3,36.

4.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA

Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Tahun 2023, yaitu :

Sudah disesuaikan dengan adanya perubahan organisasi BPPMHKP, dimana fungsi karantina ikan Sudah tidak tercantum lagi dalam PK (perjanjian kinerja pada Balai KIPM Jakarta II.

